

luwu timur
inspiring
MAJU DAN BERKELANJUTAN



RENCANA KERJA 2023

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyusun Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2023. Renja merupakan sebuah dokumen yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, khususnya dalam hal perencanaan keuangan dan aset daerah yang harus dilakukan dengan baik dan terukur.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Renja yang disusun oleh BKAD tahun 2023 menjadi panduan dalam menjalankan program-program pemerintah daerah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam penyusunan Renja BKAD Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, telah dilakukan analisis kebutuhan dan strategi yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Hal ini dilakukan agar Renja tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Sebagai penutup, kami berharap bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 dapat memberikan manfaat dan hasil yang optimal bagi pembangunan daerah. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan Renja ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Mahli, 27 Juni 2022
KEPALA BKAD Kab. Luwu Timur

Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E. M.M
Plt. Pembina Utama Muda
Nip : 197008142002121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BKAD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal BKAD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BKAD	50
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD	51
3.3 Program dan Kegiatan BKAD	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKAD	56
BAB V PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, perlu menyusun rencana kerja tahun 2023 sebagai pelaksanaan dari Rencana strategis 5 tahun Badan Keuangan Daerah dan Aset daerah.

Tahun 2023 merupakan tahun ke tiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai OPD fungsi penunjang dalam tata kelola keuangan daerah, sehingga penyusunan program kegiatan, Indikator kinerja dan dana indikatif dalam rencana kerja disusun dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD tahun 2023.

Rencana kerja Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai acuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis. oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset daerah dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan RKPD dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Keuangan dan Aset daerah, evaluasi pencapaian Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan keuangan dan Aset daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
6. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Permendagri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
9. Permendagri 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan keuangan dan Aset Daerah untuk pelaksanaan kerja 1 tahun;
- b. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan tahunan;
- c. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023 sebagai landasan operasional unsur pimpinan dan staf dalam pelaksanaan program kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun dengan kerangka sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- f. Menyusun penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP)

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka sistematika penyusunan Renja BPKD Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BKAD, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat uraian tentang gambaran kedudukan BKAD, rencana Kerja BKAD, keterkaitan antara Renja BKAD dengan Dokumen RKPD dan Renstra BKAD.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BKAD Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BKAD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BKAD, serta susunan garisbesar isi dokumen setiap BAB beserta Sub BAB sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKAD DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja BKAD Tahun lalu (tahun -2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKAD.

Memberikan uraian dan penjelasan dari hasil pelaksanaan Renja setiap program kegiatan dan capaian Renstra BKAD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD

Menjelaskan dan menyajikan hasil analisa kinerja pelayanan BKAD serta indikator yang mempengaruhi kinerja tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

Permasalahan yang dikedepankan untuk ditanggapi yang dianggap penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menyajikan tabel perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menggambarkan dan menguraikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BKAD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan dan menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKAD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD

Menguraikan dan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas tucusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD.

3.3 Program dan Kegiatan BKAD

Menguraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan BKAD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pada bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai salah satu instansi yang berperan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam kegiatannya harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan capaian Renstra pada tahun lalu. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BKAD dalam mencapai target yang telah ditetapkan serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan aset daerah.

Pada tahun lalu, pelaksanaan Renja BKAD telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian target yang telah ditetapkan. Selain itu, BKAD juga berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa BKAD telah berhasil mengelola keuangan dan aset daerah dengan baik.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih dan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun berjalan dan perkiraan target tahun 2023.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tahun 2022 dan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiat an (Output)	Target Kinerja Capaian Progran (Renstra SKPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(tah un n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020(tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegi atan Renja SKPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n- 1)		Cata tan
					Target Renja SKPD 2021 (n- 2)	Realisasi Renja SKPD 2021 (n- 2)	Tingka t Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisas i Target s/d Tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
1											
1	05										
1	05	01	2.01								
1	05	01	2.01								
1	05	01	2.01	01							
1	05	01	2.01	01							

1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu	10	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0,00	%	2	Doku men	-	Doku men	0	%
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu	10	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0,00	%	2	Doku men	-	Doku men	0	%
1	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	50	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0,00	%	10	Doku men	6	Doku men	12	%
1	0	0	2.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	%	0	%	0	%	0	%	0,00	%	98	%	50,00	%	50,00	%
1	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	71	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	%	25	Orang	25	Orang	35	%
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	95	%	0	%	0	%	0	%	0,00	%	95	%	90	%	94,74	%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	5	Doku men		Doku men		Doku men		Doku men	0,00		1	Doku men	1	Doku men	0	%
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan bahan tanggapan pemeriksaan	95	%	0	%	0	%	0	%	0,00		95	%	-	%	0	%
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	95	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0,00	%	19	Doku men	9	Doku men	9	%

1	0	0	2.		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	98 %	50 %	50 %	
1	0	0	2.	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	20 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00 %	4 Dokumen	2 Dokumen	10 %	
1	0	0	2.		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	95 %	50 %	50 %	
1	0	0	2.	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	98 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	98 %	90 %	92 %	
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	2250 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	450 Orang	125 Orang	6 %	
1	0	0	01	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	234 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00 %	46 Orang	15 Orang	6 %	
1	0	0	2.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	95 %	%	0,0 %	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	120 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0,00 %	5 jenis	5 jenis	4 %	

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 Unit	Unit	Unit	Unit	0,00	2 Unit	5 Unit	25 %	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	126 Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	0,00	18 jenis	18 jenis	14 %	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	15 Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	0,00	3 jenis	3 jenis	20 %	
1	05	01	2.06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	720 eksp	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00 %	48 Eksampler	24 Eksampler	3 %	
1	05	01	2.06	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	12500 orang	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0,00 %	2420 Orang	1.230 Orang	10 %	
1	05	01	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	1400 Kali	0 eksp	0 eksp	0 eksp	0,00 %	250 Kali	120 Kali	9 %	
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	97 %	25,00 %	25,00 %	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	100 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00 %	15 Unit	8 Unit	0 %	
1	05	01	2.07	06	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	33 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00 %	14 Unit	- Unit	0 %	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00 %	2 Unit	0 Unit	0 %	
1	05	01	2.07	05	pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau	43 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00 %	7 Unit	5 Unit	12 %	

					gedung kantor atau bangunan lainnya	bangunan lainnya yang diadakan								
1	0	0	2.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	100 %	25,00 %	25,00 %
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	30000 Surat	0 surat	0 surat	0 surat	0,00 %	6.000 Surat	3.100 Surat	10 %
1	0	0	2.	0	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	189 rekening	0 rekening	0 rekening	0 Orang	0,00 %	24 Rekening	12 Rekening	6 %
1	0	0	2.	0	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	32 Orang	0 Orang	0 Orang	0 rekening	0,00 %	3 Orang	2 Orang	6 %
1	0	0	2.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	95 %	25,00 %	25,00 %
1	0	0	2.	0	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	19 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00 %	8 unit	7 Unit	37 %
1	0	0	2.	0	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	75 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00 %	66 Unit	11 Unit	15 %

1	0	0	2.	0	pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00 %	1 Unit	1 Unit	100 %
1	0	0	05	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	(1) Persentase kesesuaian pagu anggaran KUA-PPAS dan APBD	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	100 %	25,00 %	25,00 %
						(2) Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	100 %	0 %		%	0,00 %	100 %	0,00 %	0,00
						(3) Persentase kemandirian keuangan untuk memenuhi belanja daerah	92 %	0 %		%	0,00 %	92 %	0,00 %	0,00
						(4) Persentase transparansi pengelolaan keuangan daerah yang sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	90 %	0 %		%	0,00 %	90 %	0,00 %	0,00
						(5) Persentase realisasi penyerapan anggaran belanja APBD yang optimal	95 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	95 %	- %	0 %
						(6) Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	0 %	0 %	0 Opini	0,00 %	WTP Opini	Opini	100 %

1	05	03	2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020	10 Minggu	0 Minggu	0 Minggu	0 %	0,00 %	10 Minggu	Minggu	0,00 %
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	10 Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	2 Dokumen	- Dokumen	0,00 %
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun	10 Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	2 Dokumen	- Dokumen	0,00 %
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	5 Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	59 Dokumen	- Dokumen	0,00 %
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	5 Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	59 Dokumen	- Dokumen	0,00 %
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	71 Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	71 Dokumen	12 Dokumen	16,90 %
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perda tentang APBD dan perbup tentang penjabaran APBD yang disusun yang responsif gender	10 Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	2 Dokumen	- Dokumen	0,00 %
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah	Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	10 Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	3 Dokumen	1 Dokumen	10,00 %

[illegible]

[illegible]

					Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	jumlah dokumen ranperda dan ranperbup yang tersusun	10	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0,00 %	2	Doku men	1	Doku men	10,00 %	
					Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah dokumen LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun	5	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0,00 %	1	Doku men	0	Doku men	0,00 %	
					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah regulasi kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang disusun	10	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0,00 %	2	Doku men	0	Doku men	0,00 %	
					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan akuntansi	6	Lapor an	Lapor an	Lapor an	0 %	0,00 %	2	Lapor an	1	Lapor an	16,67 %	
					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan	%	%	%	%	0 %	0,00 %	94 %	%	%	#DIV/0!	%	
					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah belanja transfer ke desa	125	Desa	Desa	Desa	0 %	0,00 %	124	Desa	124	Desa	99,20 %	

					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen dana darurat dan mendesak yang dikelola	15	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0,00 %	3	Doku men	-	Doku men	0,00 %	
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	90	%	%	%	0 %	0,00 %	90	%	%	%	0,00 %	
					Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan BMD Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	59	Peran gkat Daera h	Peran gkat Daera h	Peran gkat Daera h	0 %	0,00 %	59	Peran gkat Daera h	Peran gkat Daera h		0,00 %	
					penyusunan standar harga	Jumlah dokumen standar harga	10	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0,00 %	2	Doku men	1	Doku men	10,00	%
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah	64	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0,00 %	2	Doku men	1	Doku men	1,56	%
					penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun	10	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0,00 %	2	Doku men	1	Doku men	10,00	%
					inventarisasi barang milik daerah	Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah yang disusun	15	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0,00 %	2	Doku men	1	Doku men	6,67	%
					pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan berita acara serah terima BMD yang dilakukan	20	Lapor an	Lapor an	Lapor an	0 %	0,00 %	2	Lapor an	1	Lapor an	5,00	%
					penilaian barang milik daerah	jumlah dokumen penilaian BMD yang disusun	10	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0,00 %	2	Doku men	-	Doku men	0,00	%

					Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD yang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian	20	Laporan	Laporan	Laporan	0 %	0,00 %	2	Laporan	- Laporan	0,00 %	
					Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD yang optimal	10	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	2	Dokumen	1 Dokumen	10,00 %	
					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah berita acara rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan	5	Laporan	Laporan	Laporan	0 %	0,00 %	2	Laporan	1 Laporan	20,00 %	
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	5	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	1	Dokumen	1 Dokumen	20,00 %	
					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	10	Laporan	Laporan	Laporan	0 %	0,00 %	2	Laporan	0 Laporan	0,00 %	

2.2 Analisis Kinerja BKAD.

Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 pada Misi 4 yaitu **Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik** dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani dan sasarannya meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan maka dalam pelaksanaan tugas BKAD untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran tersebut BKAD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran Daerah;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan Daerah;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik Daerah;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dari tugas dan fungsi BKAD dimaksud, secara rinci jenis pelayanan yang diberikan, meliputi:

1. Melaksanakan proses perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
2. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian pengelolaan Keuangan Daerah secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulsel dan

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maupun secara horizontal yakni antar Perangkat Daerah;

3. Melaksanakan Penatausahaan Aset Daerah;
4. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi Keuangan Daerah;
5. Memberikan informasi dan Data potensi Keuangan Daerah;

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Dengan menggunakan indikator kinerja, organisasi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja mereka, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan target, yang dapat dilihat pada pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
Mewujudkan pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu	60 Hari
			Penyampaian LHP BPK RI tepat waktu	80 Hari

Sumber : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Capaian Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur tahunlalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

tahun berjalan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi meliputi :

- a. Kebijakan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan Pertanggungjawaban APBD;
- b. Kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. Kebijakan pengembangan SDM Aparatur.

Analisis Kinerja berdasarkan kebijakan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang terdiri dari Indikator Kinerja dan Indikator Sasaran. Target dari Indikator Kinerja Tujuan dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Target Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tahun Ke-				
		2022	2022	2024	2025	2026
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

Pada tabel 2.3 diatas, Tujuan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah Mewujudkan Pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel dengan Indikator Kinerja Tujuan adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Opini Wajar tanpa pengecualian adalah menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia.

Pada Tabel 2.4 berikut disajikan capaian realisasi Indikator Kinerja

Tujuan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.4
Capaian Realisasi dari Target Indikator Kinerja Tujuan

OPINI BPK	CAPAIAN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI

Pada Indikator Kinerja Tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya baik target dan capaian relisasinya pada tahun-tahun sebelumnya, maka perlu diuraikan juga Analisis kinerja pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berpedoman pada Indikator Kinerja Sasaranyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5
Tabel Indikator Kinerja Sasaran OPD

Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari
Penyampaian LHP BPK RI tepat waktu	80 Hari	80 Hari	80 Hari	80 Hari	80 Hari	80 Hari	80 Hari

Sumber : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

Pada tabel 2.5 Indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri

dari dua indikator Sasaran yaitu : *Pertama*, Persetujuan bersama Ranperda dan Ranperbup APBD tepat waktu dengan target 60 hari kerja dan *Kedua*, Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tepat waktu dengan target 80 hari. Penetapan target jumlah hari kerja pada Indikator Sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Sasaran sebagai salah satu Indikator Pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pencapaian tahun-tahun sebelumnya, masih mengacu pada Indikator Sasaran yang lama sebagaimana yang termuat pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2016-2021 yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2016-2021 yaitu Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah. berikut pada tabel 2.6 disajikan capaian dari Indikator Sasaran dari tahun 2018-2021.

Tabel 2.6
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran BPKAD

Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	92,00 %	94,00 %	95,00 %	97,00 %	92,00 %	96,00 %	97,00 %	98,00 %	

Sumber : Lakip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2021

Pada Tabel 2.6 diatas, Capaian Realisasi Indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan hasil yang baik. Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah mencapai angka di atas 90 persen. Capaian tertinggi pada tahun 2021 dengan nilai 98 persen.

Berdasarkan capaian realisasi Indikator sasaran diatas, maka dapat disimpulkan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Badan Keuangan dan Aset Daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai posisi yang penting dalam tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Luwu timur. Hal ini sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang menyebutkan Pejabat pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masih terdapat Isu-isu Penting sebagai berikut:

1. Sistim Informasi Teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu dioptimalkan;
2. Publikasi Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang perlu dioptimalkan;
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
4. Jumlah SDM yang belum Optimal dalam lingkup Organisasi;
5. Pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah diperlukan data yang akurat terkait barang milik daerah;
6. Meningkatkan manajemen, inventaris dan pengawasan Aset-aset milik Daerah khususnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka peningkatan tertib administrasi barang daerah;
7. Peningkatan disiplin Aparatur;
8. Pemahaman menyeluruh tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap seluruh aparatur.

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sistim Informasi Teknologi Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan terutama efektifitas waktu dalam mengeluarkan laporan yang dibutuhkan.
2. Mengoptimalkan website Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyajikan Informasi keuangan dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset

Daerah yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat.

3. Mengoptimalkan proporsional dalam pendistribusian pekerjaan sesuai dengan kompetensi masing-masing Aparatur lingkup Badan keuangan dan aset daerah.
4. Meningkatkan jumlah SDM sebagai upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset daerah.
5. Mengoptimalkan pencatatan dan validasi data terkait Barang milik daerah dan aset daerah.
6. Mengoptimalkan Sistem Informasi Barang Milik Daerah dan koordinasi antar lintas OPD sebagai pengguna barang dalam rangka inventarisasi dan pentertiban administrasi barang milik daerah dan aset daerah yang digunakan oleh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
7. Meningkatkan Disiplin Aparatur dalam bentuk Apresiasi dan Sanksi sebagai bentuk reformasi birokrasi.
8. Meningkatkan Literasi dan Koordinasi menyeluruh terhadap aparatur lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah, baik dalam bentuk updateing peraturan perundang-undangan yang terbaru, Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagaimana tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95,30	58,622,987,310	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	97	32.431.426.554	
a.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	340,000,000	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	156.089.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	3	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	69.082.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen		Jumlah dokumen RKA SKPD yang	2	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	1	3.027.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	RKA-SKPD		disusun tepat waktu								
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	1	3.000.000	
6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10	80.980.000	
b	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	98	55,117,498,541	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	98	30.209.261.354	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	46	54,677,498,541	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	46	29.524.281.354	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik		Jumlah SPJ yang diverifikasi (dokumen)	7000	160.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi		persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan	7000	177.460.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	asi Keuangan SKPD					kasi Keuangan SKPD		pengujian/verifikasi keuangan skpd			
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1	129.550.000	
4.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Persentase pemenuhan bahan tanggapan pemeriksaan	95	89.130.000	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	19	280.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	19	288.840.000	
c	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%')	98	24,000,000	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%')	98	17.090.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4	24.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun		17.090.000	
e	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	484,810,000	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	465.940.500	
2	Pendataan dan Pengolaha n Adminstra si Kepegawai an		Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	12	100.000.000	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian		persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (persen)	98	84.230.000	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	450	85.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan		Jumlah ASN yang mengikuti peraturan perundang- undangan (orang)	450	62.900.500	
4	Bimbingan Teknis Implementasi		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek,	44	299.180.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan	46	318.810.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peraturan Perundang-undangan		workshop, seminar			Perundang-undangan		teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)			
F	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	95	976,978,425	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	95	707.160.200	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4	14,978,425	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	10	15.495.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	4	2.175.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	22	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	25	9.959.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	65.000.0000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3	48.000.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (exampler)	132	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (exampler)	132	13.920.000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan minum tamu yang disediakan (kotak)	6250	90.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	250	54.450.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	250	750.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	250	563.161.200	
g.	KEGIATAN PENGADAAN BARAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	97	759,200,000	KEGIATAN PENGADAAN BARAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	97	381.950.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PEMERINTAH DAERAH					PEMERINTAH DAERAH					
1	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan (unit)	15	50.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan (unit)	20	49.000.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unt)	5	83.750.000	
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	494.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase capaian barang milik daerah yang diadakan	0	200.000.000	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	7	15.200.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase capaian barang milik daerah yang diadakan (unit)	8	49.200.000	
h	KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	506,910,690	KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	323.125.500	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan	24	40,910,690	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan	6000	78.325.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			keluar yang diadministrasikan (dokumen)					keluar yang diadministrasikan			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi dan listrik yang terbayarkan	36	282.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	67	204.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	5	184.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)	5	40.800.000	
i	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	95	328,000,000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	95	170.810.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	21	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau	19	48.120.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dan dibayarkan pajaknya			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jabatan yang dipelihara (unit)			
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	69	88,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	75	62.690.000	
3	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang diperlihara (unit)	2	120.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (unit)	1	60.000.000	
B	PROGRAM PENGELO LAAN KEUANGA N DAERAH		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Persen)	96,70	204,032,352,833	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Persen)	96,70	315.963.762.57 0	
a	KEGIATA N KOORDIN ASI DAN PENYUSU NAN		Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan	10	1,427,023,383	KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN		Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan	10	1.444.051.665	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	RENCANA ANGGARAN DAERAH		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Minggu)			DAERAH		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Minggu)			
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	70,458,722	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	95.349.644	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	65,586,968	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	87.874.740	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	1	19.776.600	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD		Jumlah dokumen verifikasi DPA yang diverifikasi	1	19,024,606	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD		Jumlah dokumen verifikasi DPA yang diverifikasi	1	19.024.606	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD		Jumlah dokumen DPA perubahan yang diverifikasi	1	19,024,606	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD		Jumlah dokumen DPA perubahan yang diverifikasi	1	19.024.606	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun	2	555,616,670	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	2	480.321.586	
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah dokumen Perda Perubahan dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	2	543,361,811	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah dokumen Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	2	506.746.911	
8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah regulasi serta kebijakan anggaran yang disusun	15	59,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah regulasi serta kebijakan anggaran yang disusun	15	138.472.200	
9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan	4	94,350,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan	4	57.236.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			anggaran belanja daerah					anggaran belanja daerah			
10	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		jumlah laporan pelaksanaan pembinaan perencanaan penganggaran daerah kabupaten/kota (laporan)	5	20.224.572	
b	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Persen)	97	955,500,000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Persen)	97	280.356.000	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah laporan pengelolaan kas daerah yang telah direkonsiliasi (laporan)	36	70.471.000	
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,					Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,		Jumlah dokumen laporan dana perimbangan	12	148.212.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		dan dana transfer lainnya (dokumen)			
6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran OPD yang telah direkonsiliasi (laporan)	708	61.673.000	
c	KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana ('%')	97	955,500,000	KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana ('%')	97	1.042.231.505	
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan		Jumlah SPM yang diverifikasi dan SP2D yang diterbitkan	18.500	221,800,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan		Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi (dokumen)	12	77.036.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengeluaran Kas Daerah					Pengeluaran Kas Daerah					
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah laporan yang telah direkonsiliasi (dokumen)	224	47.026.000	
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran yang disusun	16	155.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran yang disusun (dokumen)	18	169.275.295	
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan yang dikonsolidasikan	12	99.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan yang dikonsolidasikan	18	115.077.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Ranperda dan Ranperbup yang tersusun (dokumen)	2	439,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Ranperda dan Ranperbup yang tersusun (dokumen)	2	435.731.580	
6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah dokumen LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1	40,200,000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut LHP yang tersusun (dokumen)	1	33.045.105	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (dokumen)	2	33.280.525	
9	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil pembinaan akuntansi (laporan)	2	131.760.000	
d	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan (Persen)	95	201,649,829,450	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan (Persen)	95	313.197.123.400	
3	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah		Jumlah belanja transfer ke desa	127	195,149,829,450	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah belanja transfer ke desa (desa)	125	309.697.123.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						n Daerah					
4	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah kejadian yang tidak terduga	1	6.500.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah dokumen dana darurat dan mendesak yang dikelola (dokumen)	3	3.500.000.000	
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik (Perangkat Daerah)	58	593,600,000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik (Perangkat Daerah)	58	828.839.316	
a.	KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik (%)	90	593,600,000	KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik (%)	90	828.839.316	
1	Penyusunan Standar Harga		Jumlah dokumen standar harga disusun	2	41,200,000	Penyusunan Standar Harga		Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik (dokumen)	2	35.297.000	
3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan		Jumlah dokumen perencanaan barang milik	2	30.793.015	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Barang Milik Daerah		daerah (dokumen)			
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan	2	189,500,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun (dokumen)	2	90.468.876	
6	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah yang disusun	2	60,200,000	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah yang disusun (dokumen)	3	31.953.120	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah regulasi pedoman penyusunan RKBMD	2	111,100,000	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan berita acara serah terima BMD yang dilakukan (laporan)	20	45.456.380	
8	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah yang disusun	2	85,100,000	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen penilaian BMD yang disusun (dokumen)	2	74.925.000	
9	Pengawasan dan Pengendalian					Pengawasan dan Pengendalian		Jumlah dokumen pengelolaan	4	34.728.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Barang Milik Daerah					Pengelolaan Barang Milik Daerah		BMD yang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian (dokumen)			
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Persentase nilai BMD yang dihapus	90	106,500,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD yang optimal (dokumen)	2	209.839.500	
11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah berita acara rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan (laporan)	1	30.223.975	
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	1	30.959.450	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota (laporan)	2	214.195.000	
	Jumlah				266,468,038,143	Jumlah				349.224.028.440	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dalam tata kelola keuangan daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola keuangan daerah.

Badan Keuangan dan Aset daerah kabupaten Luwu Timur memberikan Informasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Badan Keaungan dan Aset Daerah melakukan verifikasi anggaran terhadap rancangan anggaran program kegiatan yang di usulkan oleh OPD lingkup Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan pada 2023 mencakup percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Program nasional merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Program prioritas pembangunan nasional adalah untuk menyatukan pandangan dan langkah Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk ikut mendorong pelaksanaan arah pembangunan nasional tersebut, perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Sebagai penjabaran kebijakan program Nasional dan untuk mensinergikan pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai Induk dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD

harus terintegrasi dengan RPJMN. walaupun dimungkinkan adanya, perbedaan prioritas pembangunan menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis yang bertujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan Pembangunan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 mengacu kepada Misi 4 yakni terciptanya pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dengan arah kebijakan terciptanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Adapun Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Luwu Timur

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	1. Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu 2. Penyampaian LHP BPK RI tepat waktu

Sumber : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.

Dalam Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun berdasarkan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan Kegiatan Badan Keuangan yang disusun terintegrasi dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset daerah sebagai OPD bertugas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah lingkup Kabupaten Luwu Timur.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
1.1	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

2.4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP

3 KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

4 KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5 KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6 KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Pengadaan Mebel

6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8 KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1 KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

- 1.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
- 1.3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- 1.4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- 1.5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 1.7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 1.8 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 1.9 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- 1.10 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

2 KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

- 2.1 Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah
- 2.2 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer
- 2.3 Rekonsiliasi Data Ta Penerimaan dan Pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan instansi terkait

3 KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- 3.2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan beban

- 3.3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- 3.4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 3.6 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 3.7 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
- 3.8 Penyusunan Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah
- 3.9 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/kota

4 KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 4.1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 4.2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

No PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1 KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- 1.1 Penyusunan Standar Harga
- 1.2 Penyusunan Standar Barang Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 1.3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 1.4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 1.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 1.6 Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 1.7 Pengamanan Barang Milik Daerah
- 1.8 Penilaian Barang Milik Daerah
- 1.9 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 1.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 1.11 Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 1.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 1.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah (RENSTRA BKAD) Tahun 2021-2026. Rencana Kerja menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibuat setiap tahun. Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas 3 program, 13 kegiatan dan 64 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 349.224.028.440,- Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2023 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		32.431.426.554	APBD
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		156.089.000	APBD
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	69.082.000	APBD
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.027.000	APBD
3)	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	APBD
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	80.980.000	APBD
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		30.209.261.354	APBD

	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2023 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang	29.524.281.354	APBD
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	95%	177.460.000	APBD
3)	Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 dokumen	129.550.000	APBD
4)	Pengelollan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1 dokumen	89.130.000	APBD
5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Dokumen	288.840.000	APBD
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		17.090.000	APBD
1)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	17.090.000	APBD
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		465.940.500	APBD
1)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	98 Persen	84.230.000	APBD
2)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	225 orang	62.900.500	APBD
3)	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	58 orang	318.810.000	APBD
f	Administrasi Umum Perangkat Daerah		707.160.200	APBD
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	15.495.000	APBD
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	2 Unit	2.175.000	APBD
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18 Jenis	9.959.000	APBD
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	48.000.000	APBD
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	132 exp	13.920.000	APBD
6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1300 Orang	54.450.000	APBD
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 kali	563.161.200	APBD

	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2023 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
g	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		381.950.000	APBD
1)	Pengadaan Mebel	18 unit	49.000.000	APBD
2)	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	7 Unit	83.750.000	APBD
3)	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Paket	200.000.000	APBD
4)	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5 unit	49.200.000	APBD
h	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		323.125.500	
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6000 surat	78.325.500	APBD
2)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 rekening	204.000.000	APBD
3)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 orang	40.800.000	APBD
i	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		170.810.000	
1)	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	17 unit	48.120.000	APBD
2)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	66 unit	62.690.000	APBD
3)	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	60.000.000	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		315.963.762.570	
a	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.444.051.665	
1)	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1 Dokumen	95.349.644	APBD
2)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	87.874.740	APBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	57 Dokumen	19.776.600	
3)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	57 Dokumen	19.024.606	APBD

	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2023 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
4)	Koodinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	57 Dokumen	19.024.606	APBD
5)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	480.321.586	APBD
6)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	506.746.911	APBD
7)	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	42 Dokumen	138.472.200	APBD
8)	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Laporan	57.236.200	APBD
9)	Pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	4 dokumen	20.224.572	APBD
b)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		280.356.000	
1)	Koordinasi daan pengelolaan kas daerah	36 dokumen	70.471.000	APBD
3)	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 dokumen	148.212.000	APBD
6)	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	24 dokumen	61.673.000	APBD
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1.042.231.505	
1)	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	12 Dokumen	77.036.000	APBD
2)	Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	12 Dokumen	47.026.000	APBD
3)	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	18 Dokumen	169.275.295	APBD

	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2023 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
4)	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	12 Dokumen	115.077.000	APBD
5)	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	2 Dokumen	435.731.580	APBD
6)	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	33.045.105	APBD
7)	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	2 dokumen	33.280.525	APBD
8)	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	4 kali	131.760.000	APBD
d	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		313.197.123.400	
3)	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	124 desa	309.697.123.400	APBD
4)	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	3 Dokumen	3.500.000.000	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		828.839.316	
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah		828.839.316	
1)	penyusunan standar harga	2 Dokumen	35.297.000	APBD
2)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	30.793.015	APBD
3)	penatausahaan barang milik daerah	2 Dokumen	90.468.876	APBD
4)	inventarisasi barang milik daerah	2 Dokumen	31.953.120	APBD
5)	pengamanan barang milik daerah	2 Laporan	45.456.380	APBD
6)	penilaian barang milik daerah	2 Dokumen	74.925.000	APBD
7)	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	34.728.000	APBD

	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2023 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
8)	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	2 Dokumen	209.839.500	APBD
9)	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	30.223.975	APBD
10)	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 dokumen	30.959.450	APBD
11)	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4 kali	214.195.000	APBD
JUMLAH			349.224.028.440	

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 merupakan Penjabaran dalam Mewujudkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan tahunan. Selain itu, Renja sebagai alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan. Harapannya, keberhasilan pembangunan jangka pendek untuk Urusan Pengelolaan Keuangan serta Urusan Pengelolaan Aset Daerah dapat mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Daerah tahun 2023 dengan meningkatkan kinerja yang telah dicapai dan membenahi yang masih kurang.

Rencana Kerja tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan Daerah dalam kurun waktu lima tahun.

Dengan tersusunnya Renja Tahun 2023 Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar bidang, pegawai, dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan asset daerah, serta Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dalam laporan Triwulan masing-masing bidang atau penanggung jawab Program dan kegiatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan, komitmen dan rasa tanggung jawab, etos kerja seluruh aparatur di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, dan stakeholders serta pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 untuk menjadi perhatian dan Pedoman bagi masing-masing bidang pada lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan Program kegiatannya selama tahun 2023.

Mahli, 27 Juni 2022

Kepala BKAD,



Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E. M.M

Pkt Pembina Utama Muda

Nip : 197008142002121006